PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
YAYASAN KARSA BUDI ACARYA

TENTANG

TRANSFER BUDAYA LOKAL DALAM MUATAN MATERI PENDIDIKAN ANAK SEKOLAH DASAR

NOMOR: **23.6.1/UN32.1/KS/2026**
NOMOR: 001/MoU/YKB/VI/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**,yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Titis Bayu Widagdo, M.Li**, **Ketua Yayasan Karsa Budi Acarya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Karsa Budi Acarya**, berkedudukan di **RT/RW 11/03 Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Lembaga berbentuk Yayasan** di bidang **Budaya** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **ketua sesuai akta pendirian**;
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **Yayasan Karsa Budi Acarya** dan **Universitas Negeri Malang** dengan Nomor 001/MoU/YKB/VI/2026 dan Nomor 23.6.1/UN32.1/KS/2026 tentang Kerjasama **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan**

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:
(1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar.**
(2) **Fasilitator Pelatihan Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar.**

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):
(1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Yayasan Karsa Budi Acarya;
(2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Titis Bayu Widagdo, M.Li; dan
(3) Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
   a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar** serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
   b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar**; dan
   c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
   a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar** dengan efektif dan efisien;
   b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan **Transfer Budaya Lokal dalam**

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan

c. Memastikan bahwa kegiatan **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan**.**

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi atau pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar** dengan baik; dan
c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
b. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar** sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
c. Memastikan bahwa kegiatan **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar** berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
d. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

(1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
(2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
(4) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
    a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.
    b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KEDUA.**
(3) **PIHAK KEDUA** menawarkan kegiatan **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KESATU**;
(4) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya kegiatan **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
(5) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KEDUA**;
(6) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan **Transfer Budaya Lokal dalam Muatan Materi Pendidikan Anak Sekolah Dasar**; dan
(7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

    Titis Bayu Widagdo, M.Li
    RT/RW 11/03 Desa Nglebo, Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek.

(2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

PIHAK KESATU
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama	:	Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.
Jabatan	:	Ketua Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Alamat	:	Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang 65145
Telepon	:	(0341) 551312 / HP. 08113331170
Surel	:	muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA
Yayasan Karsa Budi Acarya

Nama	:	Titis Bayu Widagdo, M.Li.
Jabatan	:	Ketua Yayasan Karsa Budi Acarya
Alamat	:	RT/RW 11/03 Desa Nglebo, Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Kodepos 66360
Telepon	:	085204266300
Surel	:	bayutitis9@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
(2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan	Ketua
Dekan	Yayasan Karsa Budi Acarya
Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.	**Titis Bayu Widagdo, M.Li.**
NIP 197304132003121001	

(3) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(4) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

(4) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
(5) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(6) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan	Ketua
Dekan	Yayasan Karsa Budi Acarya
Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.	**Titis Bayu Widagdo, M.Li.**
NIP 197304132003121001	

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua